Bali Post

Bulog Janji Ganti Raskin Tidak Berkualitas

Negara (Bali Post) -

Terkait sorotan terhadap beras rakyat miskin (raskin) yang beredar, DPRD Jembrana pada Selasa (30/6) kemarin bertemu dengan Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Bali di Kantor DPRD Jembrana. Pertemuan tertutup yang diikuti pimpinan DPRD, Ketua Komisi B dan Kepala Bulog Divre Bali ini selain membahas soal raskin juga pemberdayaan petani.

Kepala Bulog Divre Bali I Wayan Budita seusai pertemuan mengatakan terkait beras yang didistribusikan Bulog khususnya yang diterima kurang berkualitas, akan diganti. "Mekanismenya ada, desa silakan laporkan ke Bulog dan akan kami ganti. Itu gratis tanpa biaya apa pun," terangnya. Namun, untuk penggantian itu hanya berlaku selama dua hari atau 2 x 24 jam setelah diterima.

Bulog juga hanya berkewajiban mendistribusikan raskin hingga ke desa-desa. Namun, diakuinya, pola pendistribusian ke penerima sering menjadi kendala. "Itu yang menjadi kendala dan kita bicarakan dengan DPRD tadi, kadang sampai dua minggu, jangan sampai (beras) rusaknya di desa," tambahnya.

Selain itu, Bulog juga sepakat untuk menyejahterakan petani di Bali terutama saat harga gabah anjlok, sehingga petani tidak dirugikan.

Menurutnya, saat ini pihaknya menjamin bahwa beras yang diterima lebih baik dari sebelumnya.

Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa didampingi Ketua Komisi B I Nyoman S. Kusumayasa mengatakan perlunya koordinasi antara Kabupaten, Bulog, Perpadi, KUD serta Dinas Pertanian. Seperti mekanisme pengadaan jangan sampai mentok berdasarkan aturan dari pusat. Sedangkan daerah tanpa diberikan kuasa.

"Kadang menunggu datangnya bagaimana, butir patahnya 20 persen apakah patah sampai dua, sampai empat atau bagaimana. Minimal Dolog (Depot Logistik) di kabupaten menerima kadar 20 persen yang dimaksudkan," pintanya. Sehingga masyarakat tidak lagi menerima beras remuk. Begitu halnya dengan penanganan penjualan gabah petani saat panen raya, sering terjadi selisih harga standar yang disubsidi.

Dari standar Rp 7.300, namun ada yang menjual hingga Rp 7.500 sampai Rp 8.000. "Tidak mungkin dengan harga subsidi itu dapat beras, harus ada pembicaraan, kabupaten bisa memberikan subsidi," tandasnya.

Selain itu, untuk distribusi dari desa ke penerima, dewan akan mengusulkan agar dianggarkan biaya langsung sampai ke penerima dan tidak ada lagi ongkos bagi penerima. Sugiasa yang juga didampingi Wakil Ketua DPRD I Wayan Wardhana mengatakan pertemuan ini akan dilanjutkan koordinasi dengan dinas terkait di provinsi. **(kmb26)**

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 14

Bali Post

Dewan Tak Setuju Pemprov Bali Turunkan Target PAD

Denpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali menginginkan adanya rasionalisasi target pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2016. Rasionalisasi dilakukan dengan menurunkan target pendapatan dari Rp 3,35 triliun menjadi Rp 3 triliun. Sayangnya, keinginan Pemprov Bali yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini ditolak mentah-mentah oleh DPRD Provinsi Bali.

Hal itu diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali, Nyoman Parta, usai melakukan rapat konsultasi antara Banggar dengan TAPD Selasa (30/6) kemarin. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, ini berlangsung tertutup di ruang rapat Banggar, lantai 3 gedung dewan.

"Kami di dewan keberatan karena alasan eksekutif akibat situasi ekonomi, ada inflasi, dan turunnya daya beli masyarakat. Itu kan fenomena sementara," ujar Parta. Pihaknya lantas menyarankan TAPD agar menggencarkan pemanfaatan aset. Utamanya dengan menyewakan aset tanah, serta menjual aset tanah yang berada di lokasi tidak strategis.

"Aset yang posisinya tidak bagus, biasanya berukuran satu atau setengah are itu dijual saja daripada membebani," imbuhnya. Anggota Banggar lainnya, Ketut Kariyasa Adnyana, meminta Pemprov Bali tidak terlalu cepat menyerah di tengah lesunya ekonomi saat ini. Menurutnya, masih ada waktu untuk melakukan terobosan.

"TAPD harus lebih kreatif, misalnya pelayanan di Samsat Corner dan pajak progresif untuk kendaraan roda empat harus lebih ditingkatkan. Penggunaan kartu keluarga (KK) juga harus diperketat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendapatan Bali kesulitan memenuhi target 45 persen dari total pendapatan daerah pada triwulan kedua ini. Sepekan jelang berakhirnya triwulan kedua akhir Juni, Dispenda Bali justru masih harus mengejar empat persen pendapatan lagi.

"Kami memang mengalami sedikit kendala di Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terutama di BBNKB bagi kendaraan yang baru karena secara data yang kita peroleh baik dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) maupun dari Astra memang terjadi penurunan," ujar Kepala Dinas Pendapatan Bali, I Made Santha.

Menurutnya, penurunan penjualan mobil dan sepeda motor ini sangat memengaruhi pendapatan daerah dari BBNKB. Padahal, kontribusi dari BBNKB saja diharapkan Rp 1,2 triliun atau hampir setengah dari target pendapatan daerah. Sementara target pendapatan dari pajak lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan sudah bisa terpenuhi. **(kmb32)**

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 9

Bali Post

Empat Embung Belum Ada Pengelolanya

Yang Bocor Bakal Diperbaiki

Amlapura (Bali Post) -

Di Karangasem masih ada empat embung yang sudah tuntas dikerjakan, tetapi belum ada pengelola atau belum dikeluarkan SK pengelolanya. Di antaranya embung Datah 2, embung di Tanah Aron, embung di Desa Bukit II, dan proyek embung Dukuh, Kubu. Sementara dua proyek embung yang telah selesai dikerjakan tahun 2014 tetapi dua bocor, bakal diperbaiki. Hal itu disampaikan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Karangasem, Ir. Nyoman Sutirtayasa, M.T., Selasa (30/6) kemarin di Karangasem. Empat embung sebagai penampung air hujan yang belum ada SK pengelolanya berada di perbukitan atau di lereng gunung.

Terkait embung yang belum ada pengelolanya, dia minta bantuan para camat yang mewilayahi, agar memediasi pembentukan pengelola. Apakah dikelola desa, perbekelan atau kelompok masyarakat di sekitarnya. Tujuan pembentukan pengelola, agar nantinya embung itu segera bisa dimanfaatkan agar tak mubazir. Pembangunan embung ini, dikatakan menelan anggaran cukup besar sampai miliaran rupiah. "Ada embung anggarannya sampai Rp 9 miliar bahkan ada Rp 15 miliar," tegasnya.

Dikatakan, tiap ada perintah dari Bupati Karangasem I Wayan Geredeg terkait keluhan embung apakah bocor atau ada kerusakan, pihaknya sudah menugaskan stafnya, agar segera mengecek keberadaan embung tersebut. Soal indikator manfaat dari embung itu bisa dilihat dari penuhnya embung berisi air saat musim hujan. Selanjutnya air hujan di embung itu, mesti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya yang selama ini krisis air bersih.

Selain menugaskan staf mengecek embung yang bocor, pihaknya sudah menyiapkan dua orang petugas jaga pengelola, agar rutin mengecek dan memelihara embung tersebut. Misalnya, saat hujan, ada petugas jaga yang mengecek. Sehingga jika tak ada aliran air dari pipa penyadap ke embung, mesti dicek ke hulu di lokasi penyadap air, agar tak ada sampah daun kayu hutan yang hanyut menyumbat pipa. "Kalau ada endapan atau sedimen atau sampah yang menyumbat pipa, hendaknya penyumbatnya dibersihkan. Kalau ada kerusakan cukup besar yang

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 15

Bali Post

sambungan - - -

tak bisa ditanggulangi penjaga, sebaiknya segera laporkan ke kami, sehingga setelah musim hujan, embung itu penuh berisi air hujan," harapnya.

Diakui usai proyek embung yang dibiayai Balai Air Bali-Penida dikerjakan, pihaknya ditugasi agar lebih cepat mengurus penyerahan atau hibahnya ke kabupaten atau ke desa setempat. Soalnya, aset embung itu masih atas nama balai, sehingga Pemkab tak bisa menganggarkan untuk perbaikan jika diperlukan perbaikan mendesak.

Sutirtayasa mengatakan, sampai tahun ini sudah terbangun 15 buah embung di Karangasem. Sebenarnya, kalau airnya penuh pada musim hujan dan tak ada kebocoran, lumayan air hujan itu mengurangi beban masyarakat di sekitarnya. Warga tak perlu lagi membeli air dalam jumlah banyak pada musim kemarau. **(013)**

Bali Post/bud

EMBUNG - ***Embung Datah 2 di Banjar Kedampal, Datah, Karangasem belum ada pengelolanya. Embung ini hanya berisi 70 cm air hujan, karena pada musim hujan lalu tak ada air mengalir dari pipa penyadap. Soalnya, pemasangan pipa penyadap tidak pas dengan aliran air dari sungai kecil di lereng Gunung Agung.***

2

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 15

Bali Post

Kasus Pipanisasi

Terdakwa Wijaya Imam Mulai Disidang

Denpasar (Bali Post) -

Mantan bos PT Adhi Karya, Wijaya Imam Santosa, Selasa (30/6) kemarin mulai diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sehari sebelumnya, terdakwa juga disidang dalam kasus korupsi di internal PT Adhi Karya, yakni soal asuransi dan uang proyek. Kini, terdakwa yang mantan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya itu diadili kasus pipanisasi Karangasem.

JPU Made Subawa, Megawati dan Putu Gede Juliarsana dari Kejati Bali membacakan dakwaan di depan majelis hakim yang diketuai Gede Aryadi. Dalam surat dakwaan disebutkan terdakwa bersama-sama dengan Ir. Wayan Arnawa (proses kasasi), Parno Tris Hadiono, I.B. Made Oka (proses sidang) dan Kadek Novianti, melakukan dan menyuruh melakukan dan atau turut serta secara melawan hukum, telah melalukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dikatakan, pada 2009, Dinas PU Karangasem memeeroleh dana Rp 29,4 miliar untuk pengembangan sistem distribusi air minum untuk empat kecamatan, yakni Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu.

Ada 16 perusahaan yang mengikuti pelelangan, dan 13 perusahaan di antaranya yang melakukan penarawan. Berdasarkan evaluasi pelelangan, PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa nilai penawarannya Rp 26,4 miliar, PT Adhi Karya, Rp 27 miliar lebih. Seiring perjalanan lelang, PT Adhi Karya dinyatakan cadangan dan pemenangnya Waskita. Kemudian Arnawa dan tim menetapkan Adhi Karya sebagai pemenang. Karena ada kejanggalan, Waskita dan Duta Karya Perkasa melakukan sanggahan, namun akhirnya tetap dimenangkan PT Adhi Karya.

Kemudian dibuatkan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Arnawa dan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya, Wijaya Iman Santosa. Seiring perjalanan, PT Adhi Karya mulai curang. Terdakwa secara melawan hukum memerintahkan Parno Tris Hardino mengurangi kualitas pipa, dari SNI menjadi non SNI. Dan perintah tersebut dilaksanakan oleh Tris Parno, dengan mengajukan surat permintaan pengadaan pipa. Selanjutnya, Agus Peni Cahyo Muh Nur, selaku bagian pengadaan mengajukan penawaran ke PT Spindo Surabaya.

Dalam perkara ini, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Edy Hartaka, dijerat dan diancam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 jo Pasal 64 ayat 1 KHUPidana dalam dakwaan primair. Dan Pasal 3 UU yang sama dalam dakwaan subsidair. **(kmb37)**

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 3

Bali Post

Pansus Tetapkan Pajak BPHTB Nol Persen untuk Tanah Waris

Denpasar (Bali Post) - Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Denpasar berhasil merampungkan pembahasan ranperda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pada ranperda terbaru sebagai pengganti Perda No. 7 Tahun 2010 tentang BPHTB tersebut ditetapkan tarifnya sebesar 5 persen. Namun, untuk waris atau hibah yang diterima orang pribadi yang ada hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dengan pemberi hibah, ditetapkan sebesar nol persen alias tanpa biaya.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus II DPRD Denpasar Eko Supriadi didampingi Wakil Pansus II, I.B. Ketut Kiana di kantornya, Selasa (30/6) kemarin. Eko mengatakan, ketentuan ini sudah disampaikan dalam sidang paripurna intern yang telah berlangsung, Senin (29/6) lalu.

Pengenaan tarif untuk hibah kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah lebih dari satu derajat garis lurus ke atas atau ke bawah, dan hubungan darah ke samping, dikenakan biaya 0,001 persen. Ini berlaku untuk hubungan darah yang memiliki garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat 5.

Eko Supriadi mengatakan, apa yang menjadi keputusan pansus ini sudah mengakomodir aspirasi masyarakat yang selama ini masih keberatan atas pengenaan biaya BPHTB yang cukup tinggi. Ketentuan ini sudah pula sempat dikoordinasikan ke Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, kebijakan terkait pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk tanah waris dan hibah, kembali menjadi perhatian Pemkot Denpasar. Karena keringanan biaya atas pajak BPHTB untuk tanah waris dan hibah yang dilakukan selama ini, dinilai masih memberatkan. Karena itu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Denpasar merancang perubahan Perda BPHTB agar biaya untuk pajak BPHTB tanah waris dan hibah bisa ditetapkan nol persen atau bebas biaya.

Kepala Dispenda Kota Denpasar Dewa Semadi yang didampingi sejumlah kabidnya mengungkapkan, ada beberapa alasan yang mendasari perubahan terhadap perda yang berlaku sebelumnya. Terutama yang menyangkut pajak BPHTB tanah waris dan hibah. Karena pada dasarnya, untuk pengalihan tanah waris dan hibah, tidak ada transaksi. Selain itu, pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Pemprov dan juga ke pemerintah pusat. "Pada dasarnya apa yang kami usulkan bisa diterima," katanya.

Dewa Semadi mengatakan, hukum di atasnya, yakni UU terkait juga tidak mengatur tentang batasan minimal untuk biaya pajak ini. Pada UU hanya disebutkan batas maksimal saja, sehingga pihaknya mencoba untuk merancang pajak BPHTB untuk tanah waris dan hiban nol persen.

Sementara itu, pada APBD 2015 ini, Pemkot Denpasar merancang penerimaan dari pajak BPHTB ini sebesar Rp 155,3 miliar. Mengalami peningkatan sebesar Rp 9,8 miliar bila dibandingkan tahun 2014 lalu. **(kmb12)**

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 2

Bali Post

Pipa PDAM Putus

Ribuan Warga Peninjoan Kesulitan Air Bersih

Bangli (Bali Post) -

Ribuan warga Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku sejak beberapa bulan terakhir mengalami kesulitan akan air bersih. Pasalnya, pipa PDAM di Banjar Puraja yang mengalirkan air ke desa, putus akibat terjangan longsor. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih dengan harga tinggi dan beberapa ada yang mencari di sungai dekat desa.

Sekretaris Desa Peninjoan I Wayan Sutrisna, Selasa (30/6) kemarin mengungkapkan, aliran air ke desanya mulai nihil sejak dua bulan lalu. Masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan air bersih mencapai 946 KK yang terdiri dari 3.474 jiwa dan tersebar di lima banjar, yakni Karang Suwung Kaja, Tampuagan Kaja, Tampuagan Kelod, Manik Aji, dan Peninjoan.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama ini masyarakat lebih banyak mendapatkan air dari membeli dan beberapa warga terpaksa mencari air ke sungai dan mata air yang berada di sekitar desa. "Untuk dapat air masyarakat ada yang membeli. Ada juga yang mencari ke sungai," ujarnya.

Ditambahkan Sutrisna, upaya memperbaiki pipa yang tertimbun longsor itu sudah dilakukan. Hanya penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dengan cepat lantaran medannya sangat sulit, sehingga alat berat tidak mampu bekerja secara maksimal. "Upaya perbaikan sudah ada. Tetapi karena lokasinya yang sulit, kerja alat berat menjadi kurang maksimal," ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang warga Banjar Karang Suwung, I Wayan Weda, mengatakan longsor yang menerjang pipa ini sangat parah, yakni panjangnya mencapai sekitar 30 meter dan tingginya 10 meter. Pascalongsor itu, air bersih ke rumahnya langsung mati total.

Untuk kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa membeli air seharga Rp 200 ribu per 6 kubik. Air ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 20 hari. Selain membeli dalam jumlah banyak, sejumlah warga juga ada yang membeli dalam bentuk jeriken yang berisi 60 liter air seharga Rp 10 ribu. "Saya terpaksa membeli air untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harganya juga lumayan mahal dan hanya cukup untuk beberapa hari," katanya.

Dikatakan juga, pembelian air ini secara tidak langsung menambah pengeluaran masyarakat. Oleh sebab itu, tak sedikit pula masyarakat yang tempat tinggalnya jauh terpaksa mencari air ke sungai. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran setiap harinya. Lanjutnya lagi, keresahan masyarakat akan makin muncul menjelang hari raya Galungan yang jatuh beberapa hari lagi. Sebab, pada saat itu kebutuhan air akan makin meningkat, sehingga secara otomatis biaya masyarakat untuk membeli air juga turut bertambah. "Tidak adanya air sudah pasti membuat kami kelimpungan. Apalagi dekat Galungan, kebutuhan air jadi meningkat. Ya... kami berharap perbaikan pipa bisa diselesaikan dengan cepat," harapnya. **(kmb45)**

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 10

Bali Post

Rapat Paripurna II Penyampaian Pandangan Umum

Seluruh Fraksi Apresiasi Raihan WTP

SELURUH fraksi di DPRD Kabupaten Gianyar menyampaikan apresiasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, di mana Pemkab Gianyar dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2014 berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna II DPRD Gianyar, Selasa (30/6) kemarin yang beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pidato Pengantar Bupati tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014.

Rapat Paripurna dibuka Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Togog serta dihadiri Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata, Wabup Made Mahayastra, jajaran Muspida, pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Gianyar, camat, dan unsur terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, kelima fraksi yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura NasDem juga menyampaikan apresiasi atas dinobatkannya Gianyar menjadi kabupaten terbaik dalam ajang Indonesia's Attractiveness Award 2015 dari majalah *Tempo*, sekaligus Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata yang masuk tiga besar nominator Anugerah Seputar Indonesia kategori Pemerintahan Berprestasi.

Secara umum, fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan perlunya terus diupayakan peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Yang tak kalah penting, kelima fraksi menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2014 yang mencapai Rp 239.737.666.547,32. Eksekutif diminta lebih cer-

PARIPURNA - *Suasana Rapat Paripurna II DPRD Gianyar yang dilangsungkan Selasa (30/6) kemarin.*

1

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 11

Bali Post

Sambungan - - -

mat dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Dewan juga meminta eksekutif menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sehingga opini WTP tetap bisa dipertahankan.

Wakil Ketua DPRD, Made Togog, usai penyampaian pandangan fraksi-fraksi mengatakan, penyampaian jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Ranperda Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, selanjutnya akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna III, Jumat (3/7).

Dihubungi terpisah, Sekda Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra menyatakan, pandangan umum fraksi di DPRD menyampaikan terkait dengan Silpa, semata-mata sebagai upaya efisiensi penggunaan anggaran dan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk masalah PDAM, saat ini sudah dibentuk tim seleksi Direksi PDAM dengan melibatkan unsur akademisi untuk peningkatan pelayanan air bersih di Kabupaten Gianyar.

Sementara, kebijakan pengangkatan PNS adalah kewenangan dari pemerintah pusat, namun Pemkab Gianyar tetap mengajukan usulan untuk mengisi kekosongan tenaga guru dan kesehatan. Terkait dengan etika pegawai, akan dilakukan evaluasi dan pembinaan sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk masalah kemacetan di Ubud, Pemkab Gianyar telah bekerja sama dengan ITB untuk merancang rekayasa lalu lintas dalam mengatasi kemacetan. **(ad2466)**

2

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 11

Bali Post

Sidang Kasus Raskin

Saksi Tidak Konsisten, Hakim Kesal

Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi beras miskin (raskin) dengan terdakwa Anak Agung Bagus Semaraputra, selaku Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar, semakin blunder. Saksi-saksi yang dihadirkan JPU Herdan Rahadi dkk. dari Kejari Gianyar tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Atas kondisi itu, majelis hakim yang diketuai Achmad Peten Sili didampingi Beslin Sihombing dan Miptahul menjadi kesal. Bahkan, jika kondisi sidang seperti ini, hakim nyeletuk bahwa kasus raskin ini bisa lebih ribet dari kasus Century.

Saksi-saksi yang dihadirkan kemarin ada enam. Dua orang dari Bulog dan sisanya warga miskin.

Saksi pertama yang didengar keterangannya adalah Drs. Made Oka dan Adityo dari Bulog. Kedua saksi ini tidak konsisten karena sering berubah-ubah. Misalnya, saat saksi ditanya soal keterlambatan pengiriman beras pada tahun 2013. Saat itu, saksi Oka yang menjabat korlap pembagian beras di Bulog mengaku tidak pernah ada keterlambatan. Dia menjelaskan paling lama (keterlambatan) mungkin dua bulan saja. Kala keterangan itu dikonfirmasi dengan terdakwa, ternyata pada awal 2013 tepatnya Januari hingga April terjadi keterlambatan. "Beras untuk Januari, Februari dan Maret baru dikirimkan bulan April," beber terdakwa.

Oka yang ditanya atas jawaban itu oleh majelis hakim sempat membantahnya. Namun saat didesak, akhirnya mengaku saksi mengakui. "Iya, waktu itu telat sampai empat bulan," ujarnya polos. Sontak jawaban itu membuat hakim geram.

Saksi lainnya adalah penerima raskin yaitu I Wayan Kasbila, I Wayan Antara, Ni Nyoman Maryani dan Ni Nyoman Miasih. Kesaksian warga ini kembali membuat hakim jengkel. Saksi ini mengatakan rutin menerima beras setiap bulannya. Saat ditanya soal beras raskin ke-13, 14 dan 15, keempat saksi mengaku tidak tahu. Mereka hanya mengaku setiap bulannya terima satu karung beras. **(kmb37)**

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 3

Bali Post

Terkait Kasus PHR

Penyidik Evaluasi dan Analisis Keterangan Saksi

Denpasar (Bali Post) - Belasan saksi sudah dimintai keterangan atas dugaan penyimpangan pembagian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) untuk enam kabupaten di Bali. Namun, penyidik belum menyimpulkan apakah ada pelanggaran atau perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara yang sudah memeriksa sejumlah pejabat teras di Pemprov Bali dan kabupaten/kota di Bali.

Informasi yang diperoleh *Bali Post* di Kejati Bali, Selasa (30/6) kemarin, pemeriksaan Kabiro Hukum Pemprov Bali sangat menentukan laju perkembangan kasus tersebut. Sehingga saat ini, penyidik Made Tangkas dkk, sedang melakukan evaluasi dan analisis terhadap data dan hasil pemeriksaan yang diperoleh selama sebulan ini.

Informasi tersebut dibenarkan Kasipenkum Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan. "Ya, pemeriksaan saksi-saksi kan sudah cukup banyak. Sekarang penyidik sedang mengevaluasi dan menganalisi data dan bahan keterangan itu," sebut Ashari Kurniawan. Dikatakan, bahwa saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah statusnya bisa naik ke penyidikan atau tidak. Yang jelas, jika ditemukan adanya kecurangan atau indikasi melanggar hukum, maka pihak kejaksaan akan terus menggenjot perkara yang dilaporkan oknum anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana.

Atas dugaan penyimpangan pembagian PHR itu, sebagaimana diketahui, sejumlah pejabat sudah dimintai keterangan dengan status sebagai saksi. Mereka adalah Sekdaprov Cokorda Pemayun, Karo Hukum Pemprov Bali Ida Bagus Ngurah Arda, mantan Kadispenda Bali Wayan Suarjana, yang saat ini Sekwan DPRD Bali. Sedangkan saksi yang diperiksa di tingkat kabupaten ada Kadispenda Badung Adi Arnawa, Kadispenda Bali Wayan Suarjana, yang saat ini Sekwan DPRD Bali, Kadispenda Kota Denpasar Dewa Semadi, Kasubag Keuangan Bangli I Ketut Nurjana, S.E. dan Kasubag Keuangan Tabanan Wayan Arimbawa. Ada juga pejabat dari Klungkung dan sejumlah pejabat lainnya. **(kmb37)**

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal : 3